Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum

Nurliah Nurliah ¹, Abdul Rahman Mus ², Ibrahim Dani ³

^{1,2,3}, Magister Manajemen, Universitas Muslim Indonesia.

¹ Koresponden Penulis, E-mail: nurliah.nurliah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar setelah implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Metode analisis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yaitu menggunakan analisis Rasio Keuangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-36/PB/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil analisis rasio kas, rasio lancar, dan periode penagihan piutang di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar selama tahun 2015-2018 tergolong kurang baik, dimana rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil analisis rasio keuangan tersebut berada di bawah nilai kisaran maksimum berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012; (2) Hasil analisis perputaran aset tetap (PAT), imbalan atas aktiva tetap (ROA), dan imbalan ekuitas (ROE) menunjukkan kondisi keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar selama tahun 2015-2018 tergolong baik, dimana rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil analisis rasio keuangan tersebut mendekati atau mencapai nilai kisaran maksimum berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012; dan (3) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang memiliki nilai rasio keuangan dan pendapatan BLU secara keseluruhan adalah 44,7% dengan predikat penilaian kinerja keuangan digolongkan dalam klasifikasi "cukup sehat"

Kata Kunci: perputaran aktiva tetap (PAT), pengembalian aset (ROA), dan pengembalian untuk ekuitas (ROE)

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the financial performance of RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar after the implementation of the Financial Management Pattern of the Public Service Agency (PPK-BLU) based on the Director General of the Treasury Regulation Number: PER-36 / PB / 2012 at Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. The data used are quantitative data and qualitative data. The analysis method that will be used by the authors in this study is a quantitative analysis method that is using the analysis of Financial Ratios based on the Director General of Treasury Regulation Number: Per-36 / PB / 2012. The results showed that: (1) analysis of cash ratios, current ratios, and accounts receivable collection periods at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar during 2015-2018 was classified as not good, where the average value obtained from the analysis of financial ratios was below the maximum range value based on the Director General of the Treasury Regulation Number: PER-36 / PB / 2012; (2) The results of analysis of fixed asset turnover (PAT), return on fixed assets (ROA), and return on equity (ROE) show the financial condition of RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar during 2015-2018 was classified as good, where the average value obtained from the analysis of the financial ratios approached or reached a maximum range value based on the Director General of the Treasury Regulation Number: PER-36 / PB / 2012; and (3) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, whose overall financial ratio and BLU income is 44.7% with the rating of financial performance classified as "quite healthy"

Keyword: fixed asset turnover (PAT), asset return (ROA), and return on equity (ROE)

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana diamanahkan dalam pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk modelnya beraneka macam. Jenis BLU di sini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Peraturan keuangan negara telah merubah mindset atau pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan, dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari hanya membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat berarti mengingat kebutuhan dana yang semakin tinggi, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas ([Ahmad Hag, 2009](#)).

Tuntutan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good government governance) disektor pemerintah terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak kewarganegaraan. Penciptaan tata kelola yang baik tersebut menuntut perubahan dalam sistem manajemen keuangan pemerintah. Tuntutan tersebut juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang sedang melanda dunia, yang menjadikan norma-norma tata kehidupan suatu negara sebagai bagian integral dari norma umum kehidupan dunia sehingga praktik-praktik dunia bisnis dan pemerintah suatu negara akan terpengaruh oleh norma-norma umum yang berada di negara lain.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good government governance secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola yang baik tersebut antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Demokrasi.

Perubahan paradigma dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang paling menonjol sebagai bagian dari paket reformasi dibidang keuangan negara adalah adanya pergeseran dari sistem penganggaran tradisional kesistem penganggaran berbasis kinerja, dimana pembiayaan tidak hanya membiayai masukan (inputs) atau proses, tetapi sudah diarahkan pada pembiayaan yang membiayai hasil (outputs).

Adanya BLU ini membuka kesempatan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layaknya kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, lisensi dan penyiaran) dengan lebih efektif, untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh birokrat murni, tetapi berpotensi lebih efektif dan efisien bila diselenggarakan oleh Instansi yang dikelola bisnis (business like).

Di lingkungan pemerintah di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan Layanan Umum. Diantara mereka ada yang memperoleh imbalan dari masyarakat dalam proporsi signifikan sehubungan dengan layanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana yang disediakan oleh APBN/APBD. Kepada mereka, terutama yang selama ini mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Salah satu yang menyebabkan rendahnya mutu pelayanan di instansi pemerintah tersebut adalah rendahnya fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintah memberikan sejumlah fleksibilitas untuk instansi yang menerapkan PPK-BLU. Fleksibilitas tersebut yang menganut prinsip manajemen bisnis yang sehat. Fleksibilitas BLU meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, utang, investasi, pemanfaatan surplus, dan remunerasi. Di samping itu, untuk mendukung manajemennya, BLU menerapkan sistem akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi komersial yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, merupakan salah satu satuan kerja dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menerapkan PPK-BLU sejak tahun 2005 berdasarkan Surat Menteri Kesehatan Nomor: 861/MENKES/VI/2005 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/VIII/2005, yang sebelumnya berstatus perusahaan jawatan (PERJAN). RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar diharapkan dapat mengalami peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan jasa rumah sakit kepada masyarakat, sebagai salah satu agen pemerintah yang melakukan fungsi pelayanan masyarakat.

Untuk menilai kembali kinerja keuangan, perlu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit dan sumber daya yang ada disekitarnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pencapaian rencana-rencana kegiatan usahanya, dengan demikian penilaian kinerja itu sangat penting dilakukan.

Jika ditinjau dari aspek manajemen keuangan, BLU menerapkan manajemen bisnis dimana kegiatannya operasional BLU diarahkan pada praktek bisnis yang sehat. Tentu operasional manajemen keuangan BLU ini berbeda dengan satuan kerja yang murni menerapkan pola APBN/APBD. Walaupun manajemen keuangan BLU menerapkan manajemen bisnis yang sehat, tetapi BLU ini berbeda dengan BUMN/BUMD yaitu BLU tidak mengejar keuntungan (non profit oriented), sedangkan BUMN/BUMD merupakan badan usaha yang mengejar keuntungan.

Pola pengelolaan yang berbasis praktek bisnis yang sehat yang berlaku pada sektor-sektor yang terkait dalam operasional masing-masing BLU, tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pada satuan-satuan kerja pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLU, khususnya bagi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menerapkan standar akuntansi rumah sakit yang telah berlaku umum, dalam hal ini sesuai dengan standar akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Meskipun demikian, sebagai salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Kesehatan, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tetap mengkonsolidasikan laporan operasionalnya dengan laporan keuangan Kementerian Kesehatan, karena sebagian dana operasional dan investasi berasal dari dana APBN Kementerian Kesehatan, sebagai pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja dari Kementerian Kesehatan. Persyaratan pendirian BLU meliputi tiga hal yakni persyaratan substantif, teknis dan administratif (Nurmandi, 2010).

Instansi BLU mempunyai sisi yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi instansi yang menerapkan BLU merupakan instansi pemerintah yang menerapkan prinsi-prinsip manajemen bisnis yang sehat, dapat menggunakan langsung pendapatan untuk operasionalnya tanpa menyetor ke kas negara/ kas daerah dan surplus BLU yang diperoleh dapat digunakan untuk menambah penghasilan BLU. Tetapi di sisi lain instansi yang menerapkan PPK-BLU merupakan satuan kerja pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menjadi objek Penelitian dalam "Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (setelah Implementasi PP 23 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum). Untuk melihat kinerja keuangan tersebut, maka kami memerlukan alat analisis rasio, yang menghubungkan data-data keuangan yang satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini kami menggunakan Indikator rasio keuangan 6 (enam) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-36/PB/2012. Adapun indikator keuangan yang dimaksud adalah a) Rasio Kas (cash rasio) b) Rasio Lancar (current rasio) c) Periode Penagihan Piutang (collection period) d) Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) e) Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) f) Imbalan Ekuitas (return on equity)

Kerangka konseptual dalam penelitian ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka diajukan hipotesis:

1. Rasio Likuiditas, Rasio Aktifitas, Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
2. Variabel Kinerja Keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (Implementasi PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum) adalah sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Suatu observasi yang dilakukan berkali-kali akan membentuk pola tertentu

Untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui: Pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 dan struktur organisasi (data sekunder) serta wawancara dengan pihak manajemen dan staf yang terkait dengan masalah pokok (data primer)

Metode analisis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan alat analisis yang dikenal sebagai Indikator rasio Keuangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-36/PB/2012.

Analisis Rasio Keuangan adalah suatu metode analisis yang menjelaskan hubungan antara dua data keuangan. Data keuangan tersebut bersumber dari laporan keuangan, yakni neraca dan laporan surplus deposit. Ada 6 indikator rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Rasio Kas (Cash Ratio); Rasio Lancar (Current Ratio); Periode Penagihan Piutang (Collection Period); Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover); Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset); Imbalan Ekuitas (Return on Equity); adapun rumus-rumus dari tiap-tiap jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Rasio Keuangan dengan menggunakan indicator sebagai berikut :

- a. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rumus :

$$RK = \frac{\text{Kas dan setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100 \%$$

- b. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rumus :

$$RL = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100 \%$$

- c. Periode penagihan piutang (Collection period)

Rumus :

$$PPP = \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Rumus :

$$PAT = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100 \%$$

e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset)

Rumus :

$$ROA = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

Rumus :

$$ROE = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

g. Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional

Rumus :

$$PB = \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasioanal}} \times 100\%$$

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Laporan keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar disusun dalam bentuk neraca dan laporan laba-rugi untuk setiap akhir periode/akhir tahun. Untuk tujuan analisis ini akan diperlihatkan laporan keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, yang terdiri dari:

1. Neraca RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar per 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2018.
2. Laporan rugi-laba RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1. Laporan Neraca RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode 2015 S.D 2018

NAMA PERKIRAAN		TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
ASET					
ASET LANCAR					
	Kas pada Badan Layanan Umum	55,305,126,828	106,603,423,808	105,590,669,218	83,502,293,439
	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	36,030,050,588	133,805,945,376	130,618,559,144	128,807,220,017
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(2,506,846,618)	(5,000,859,681)	(7,235,138,590)	(8,624,652,638)
	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	33,523,203,970	128,805,085,695	123,383,420,554	120,182,567,379
	Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	197,518,715	140,729,488	394,111,833	213,884,544
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(987,594)	(703,647)	(1,970,559)	(1,069,423)
	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	196,531,121	140,025,841	392,141,274	212,815,121
	Persediaan	34,094,021,923	27,409,315,418	31,066,012,406	44,011,152,431
	JUMLAH ASET LANCAR	123,118,883,842	262,957,850,762	260,432,243,452	247,908,828,370
ASET TETAP					
	Tanah	85,777,504,000	85,777,504,000	861,190,516,000	861,190,516,000
	Peralatan dan Mesin	415,937,267,676	501,014,130,980	561,052,375,328	613,165,052,678
	Gedung dan Bangunan	230,366,459,991	422,696,408,337	452,370,437,191	426,638,318,285
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25,446,436,435	27,480,523,185	28,732,728,498	28,801,554,998
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	136,853,574,284	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	57,188,000
	Akumulasi Penyusutan	(346,180,979,943)	(395,492,982,412)	(413,749,570,564)	(486,806,794,166)
	JUMLAH ASET TETAP	548,200,262,443	641,475,584,090	1,489,596,486,453	1,443,045,835,795
ASET LAINNYA					
	Aset Tak Berwujud	1,106,280,000	1,106,280,000	1,126,430,000	1,126,430,000
	Aset Lain-lain	10,191,042,295	19,494,261,870	26,494,394,336	14,988,503,650
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(10,178,313,895)	(17,806,749,949)	(25,436,516,105)	(15,005,509,363)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1,119,008,400	2,793,791,921	2,184,308,231	1,109,424,287
	JUMLAH ASET	672,438,154,685	907,227,226,773	1,752,213,038,136	1,692,064,088,452
KEWAJIBA					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang kepada Pihak Ketiga	25,118,090,457	50,659,306,283	48,653,379,631	138,718,203,673
	Pendapatan Diterima Di Muka	407,675,000	325,472,384	504,127,050	1,120,309,464
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25,525,765,457	50,984,778,667	49,157,506,681	139,838,513,137
	JUMLAH KEWAJIBAN	25,525,765,457	50,984,778,667	49,157,506,681	139,838,513,137
EKUITAS					
	Ekuitas	646,912,389,228	856,242,448,106	1,703,055,531,455	1,552,225,575,315
	JUMLAH EKUITAS	646,912,389,228	856,242,448,106	1,703,055,531,455	1,552,225,575,315
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	672,438,154,685	907,227,226,773	1,752,213,038,136	1,692,064,088,452

Tabel 2. Laporan Operasional RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode 2015 s/d 2018

URAIAN	TOTAL			
	2015	2016	2017	2018
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Alokasi APBN	212,214,746,325	265,951,659,128	180,513,215,779	129,800,100,129
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	322,873,388,140	552,708,054,768	462,944,086,651	387,389,875,251
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	-	-	-
Pendapatan Hibah BLU	1,607,005,545	1,673,529,550	2,824,272,299	6,656,750,852
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2,970,902,684	2,721,142,772	3,000,174,833	4,038,426,075
Pendapatan BLU Lainnya	6,739,326,242	4,844,156,197	5,749,166,718	11,964,505,961
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	546,405,368,936	827,898,542,415	655,030,916,280	539,849,658,268
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	222,851,273,131	253,409,796,720	272,031,719,466	282,611,322,861
Beban Persediaan	224,568,209,136	210,804,132,639	251,404,959,789	192,461,559,964
Beban Barang dan Jasa	22,449,887,253	44,397,488,810	47,452,132,587	69,649,545,337
Beban Pemeliharaan	9,976,080,122	44,955,451,249	50,913,527,603	53,024,664,357
Beban Perjalanan Dinas	2,688,449,986	3,149,401,222	3,958,639,462	3,824,906,032
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	632,459,988
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	53,216,116,780	56,543,178,270	64,435,842,268	69,402,811,410
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	475,571,295	2,494,716,710	2,235,545,821	1,390,583,471
Beban Transfer	-	-	-	-
Beban Lain-Lain	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	536,225,587,703	615,754,165,620	692,432,366,996	672,997,853,420
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	10,179,781,233	212,144,376,795	(37,401,450,716)	(133,148,195,152)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	16,699,975	4,350,000	3,999,999	212,999,996
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	1,019,003,093
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	16,699,975	4,350,000	3,999,999	(806,003,097)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	161,071,959	643,363,637	91,217,458,615	25,005,184,695
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	4,872,240	52,024,073,736	34,042,093,323
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	161,071,959	638,491,397	39,193,384,879	(9,036,908,628)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	177,771,934	642,841,397	39,197,384,878	(9,842,911,725)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	10,357,553,167	212,787,218,192	1,795,934,162	(142,991,106,877)
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (DILUAR PENDAPATAN APBN)	(201,857,193,158)	(53,164,440,936)	(178,717,281,617)	(272,791,207,006)

Berdasarkan data pada table 1 dan 2, nampak bahwa total aktiva, hutang, modal sendiri, dan pendapatan mengalami peningkatan setiap tahun selama tahun 2015 sampai 2018, sedangkan tingkat laba yang dicapai RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Makassar mengalami fluktuasi selama tahun 2015 sampai 2018. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

Tabel 3. Rekapitulasi Analisis Rasio Keuangan pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2015-2018

Rasio Keuangan	Tahun Buku				Rata-rata	Penilaian Kinerja Menurut PER-36/PB/2012		Kategori Penilaian Kinerja
	2015	2016	2017	2018		Pengukuran	Skor	
1. Rasio kas (%)	220,18	210,43	217,03	60,20	176,96	$176 < RK \leq 180$	4	Kurang baik
2. Rasio lancar (%)	490,16	519,07	535,28	178,71	490,16	$490,16 < RL \leq 600$	10,4	Baik
3. Periode penagihan piutang (hari)	40,17	87,15	101,57	119,70	87,15	$87,15 \leq PPP < 100$	2	Kurang baik
4. Perputaran aset tetap (%)	43,90	54,03	24,78	20,90	43,90	$43,9 < PAT$	10	Baik
5. Imbalan atas aktiva tetap (ROA) (%)	-5,57	13,55	-0,70	-4,29	0,75	$0 < ROA \leq 1$	0,5	Tidak baik
6. Imbalan ekuitas (ROE) (%)	-6,63	21,81	-0,76	-4,91	5,38	$5 < ROE \leq 6$	3	Cukup baik
7. Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional (%)	69,19	100,49	75,56	67,93	78,29	$78,29 < PB$	12	Baik
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN RSUP Dr WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR TAHUN 2015-2018						Skor maksimum 65	41,9	Sedang (B)

B. Pembahasan

Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan perkembangan finansial RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang tergolong kurang baik selama tahun 2015-2018 adalah rasio kas, rasio lancar, dan periode penagihan piutang. Rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil analisis rasio keuangan dari ketiga rasio keuangan tersebut berada di bawah nilai kisaran maksimum berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Persentase rasio kas (RK) sebesar 176,96% dengan skor 4 dari skor maksimum 10 yang disyaratkan atau rata-rata nilai rasio kas tersebut berada di bawah nilai kisaran maksimum yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dengan demikian, kondisi rasio kas tersebut tergolong kurang baik selama tahun 2015-2018, yang berarti bahwa RSUP

Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum mampu melunasi hutang jangka pendeknya dengan kas yang dimilikinya, Oleh karena itu, rasio kas yang dicapai masih perlu ditingkatkan hingga mencapai skor maksimum dengan memberdayakan secara maksimal kas yang dimilikinya agar RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memiliki kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya guna mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa akan datang.

Persentase rasio lancar 490,16 % dengan skor 10,4 dari skor maksimum 13 yang disyaratkan, atau rata-rata nilai rasio lancar tersebut berada di bawah nilai kisaran maksimum yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dengan demikian, kondisi rasio lancar tersebut tergolong baik selama tahun 2015-2018, yang berarti bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar mampu melunasi hutang jangka pendeknya dengan jaminan seluruh aktiva lancar yang dimilikinya. Oleh karena itu, rasio lancar yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan hingga mencapai skor maksimum dengan memberdayakan secara maksimal seluruh aktiva lancar yang dimilikinya agar RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memiliki kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya guna mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa akan datang.

Periode penagihan piutang selama 87 hari dengan skor 2 dari skor maksimum 10 yang disyaratkan atau rata-rata nilai rasio periode penagihan piutang tersebut berada di bawah nilai kisaran maksimum yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dengan demikian, kondisi rasio periode penagihan piutang tersebut tergolong kurang baik selama tahun 2015-2018, yang berarti bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum mampu mengumpulkan piutang usaha dengan memaksimalkan seluruh pendapatan usaha yang dimilikinya, Oleh karena itu, rasio periode penagihan piutang yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan hingga mencapai skor maksimum dengan memaksimalkan pengumpulan piutang usaha agar RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memiliki kemampuan untuk mengumpulkan piutang usaha dengan cepat guna mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa akan datang.

Rasio perputaran aset tetap (PAT) yang diperoleh sebesar 43,9% dengan skor 10 dari skor maksimum 10 yang disyaratkan atau rata-rata nilai rasio lancar tersebut mencapai nilai kisaran maksimum berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dengan demikian, kondisi rasio keuangan tersebut tergolong baik selama tahun 2015-2018, yang berarti bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memiliki kemampuan menggunakan seluruh aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa akan datang.

Rasio Imbalan atas aktiva tetap (ROA) sebesar 0,75% dengan skor 0,5 dari skor maksimum 5 yang disyaratkan, atau rata-rata nilai rasio ROA tersebut jauh di bawah nilai kisaran maksimum berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dengan demikian, kondisi rasio keuangan tersebut

tergolong tidak baik selama tahun 2015-2018, yang berarti bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum memiliki kemampuan dalam meningkatkan laba bersih dengan memberdayakan seluruh aktiva guna mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa akan datang.

Rasio Imbalan ekuitas (ROE) sebesar 5,38% dengan skor 3 dari skor maksimum 5 yang disyaratkan, atau rata-rata nilai rasio ROE tersebut belum mencapai nilai kisaran maksimum yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dengan demikian, meskipun demikian kondisi rasio keuangan tersebut tergolong cukup baik selama tahun 2015-2018, yang berarti bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memiliki kemampuan meningkatkan laba bersih dengan memberdayakan seluruh modal sendiri (ekuitas) guna mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa akan datang.

Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional diperoleh sebesar 78,29% dengan skor 12 yang disyaratkan, atau rata-rata nilai rasio keuangan tersebut telah mencapai nilai kisaran maksimum yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dengan demikian, kondisi rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional tergolong baik selama tahun 2015-2018, yang berarti bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan melalui penggunaan biaya yang efektif guna mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa akan datang.

Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan perkembangan finansial RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang tergolong baik selama tahun 2015-2018 adalah Rasio Lancar (RL), perputaran aset tetap (PAT), dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional. Selanjutnya yang menunjukkan kondisi keuangan yang cukup baik adalah indikator pengukuran Imbalan ekuitas (ROE). Sedangkan yang menunjukkan kurang baik hingga tidak baik adalah pengukuran rasio kas, periode penagihan piutang, dan imbalan atas aktiva tetap (ROA), sehingga perlu mengaktifkan pemberdayaan kas dan aktiva, serta penagihan piutang agar diperoleh rasio keuangan mendekati atau mencapai nilai kisaran maksimum yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Sehubungan dengan penilaian kinerja keuangan di bidang layanan kesehatan untuk rasio keuangan dan pendapatan BLU secara keseluruhan dengan bobot maksimum 65 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum, menunjukkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang memiliki nilai rasio keuangan dan pendapatan PNBPN secara keseluruhan adalah 41,9% dengan predikat penilaian kinerja keuangan digolongkan dalam klasifikasi "Sedang" atau kategori B (apabila $40 < \text{Total Skor} < 50$) karena nilai rasio tersebut berada di bawah rata-rata dari bobot maksimum yang disyaratkan yakni bobot 65. Oleh karena itu, kinerja keuangan pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang tergolong klasifikasi "Sedang" atau cukup sehat, sehingga masih perlu ditingkatkan terutama yang terkait dengan mengaktifkan penggunaan kas,

penagihan hutang, dan lebih memberdayakan seluruh aktiva dan modal sendiri dalam meningkatkan laba serta pemanfaatan biaya operasional dipergunakan secara efektif guna mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa akan datang. Penilaian kinerja keuangan selama tahun 2015 sampai 2018 tergolong kurang sehat, sehingga indikator-indikator pengukuran kinerja keuangan perlu diberdayakan secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan laba pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar di masa akan datang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis nilai rasio keuangan selama tahun 2015 sampai 2018 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tergolong “cukup baik”, dimana kondisi rasio keuangan yang tergolong baik hanya terdapat pada Rasio Lancar (RL), perputaran aset tetap (PAT), dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional, dan yang menunjukkan kondisi keuangan yang cukup baik adalah Imbalan ekuitas (ROE), serta yang menunjukkan kurang baik hingga tidak baik adalah pengukuran rasio kas, periode penagihan piutang, dan imbalan atas aktiva tetap (ROA). Sedangkan hasil analisis nilai rasio keuangan dan pendapatan PNBPN secara keseluruhan selama tahun 2015 sampai 2018 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tergolong “cukup sehat” karena nilai rasio mencapai 41,9 dengan predikat penilaian kinerja keuangan berada pada klasifikasi “Sedang” atau kategori B (apabila $40 < \text{Total Skor} < 50$) dimana nilai rasio tersebut berada di atas rata-rata dari bobot maksimum yang disyaratkan yakni bobot 65.

Hasil penelitian ini menyarankan agar kinerja keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar masih perlu ditingkatkan, dengan mengefektifkan penggunaan kas, dan seluruh aktiva lancar, serta mampu pengumpulan piutang dengan cepat agar kinerja keuangan dapat ditingkatkan di masa akan datang. Diperlukan upaya meningkatkan laba RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar melalui peningkatan pendapatan dan menekan biaya-biaya operasional agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan atau lebih bagus dari sebelumnya. Kinerja keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang tergolong tidak baik dan kurang baik agar lebih diefektifkan lagi pemberdayaannya terutama yang terkait dengan kas dan seluruh aktiva guna mendukung peningkatan kinerja keuangan agar berada pada kategori “sehat” di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER -36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
- Undang-undang Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Jakarta
- Cascio, Wayne. (1992). Managing Human Resource. International Edition, McGraw Hill Inc
- Depkes, Ditjen Yanmed, (1994). Informasi Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
- Erich A, Helfert, (1997). Teknik-teknik Analisis Keuangan, Petunjuk Praktis untuk Mengelola dan mengukur Kinerja Perusahaan. Terjemahan Herman Wibowo, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: ALFABETA.
- Gibson, Charles H, (1989). Financial Statement Analysis. Using Financial Accounting Information, Fourth Edition. PWS-Kent Publishing Company, Boston.
- G.Foster, (1986). Financial Statement Analysis, Second Edition, Stanford Ford University, Prentice-Hall International, New Jersey, USA
- Hanafi, Mamduh M, dan Halim, Abdul, (2009). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hilmy, (2003). "Analisis Kinerja keuangan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar" Universitas Hasanuddin, Makassar
- Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan- Integrated and Comprehensive Edition. Penerbit: Grasindo
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (1994). Prinsip Akuntansi Indonesia, 1994 Edisi Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Jakarta: Salemba Empat
- Jumingan. (2013). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara
- Kasmir. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Munawir, S., (1997). Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Munawir, S. (2012). Analisis Informasi Keuangan, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Karya Satya Azhar, (2010). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah" Dosen STIE Harapan Medan. Medan.
- Sutrisno, (2000). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta